BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pengukuran kinerja sektor public adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi,karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward andpunishment systems*. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,visi dan misi organisasi yang tertuang dalam dalam strategic planning suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya,termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai prestasi manajer unit organisasi yang dipimpinnya.Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan public yang lebih baik. Akuntabilitas disini bukan sekedar kemampuan menunjukkan uang public dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjaka secara ekonomis, efisien dan efektif. Kinerja sektor public bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indicator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komperhensif. Berbeda dengan sektor swasta,karena sifat output yang dihasilkan sektor public lebih banyak bersifat *ingtangible* output,maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor public. Oleh karena itu,perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial. Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan dalam melaksanakan program selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya.Salah satu faktor yang menjadi kriteria untuk mencapai kelancaran tujuan suatu organisasi atau instansi dalam melaksanakan program selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya.Salah faktor yang menjadi kriteria untuk mencapai kelancaran tujuan suatu organisasi atau instansi adalah mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawainya.Organisasi merupakan suatu kesatuan kompleks yang

berusaha mengalokasikan sumber daya manusia secara penuh demi tercapainya suatu tujuan.Apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif.Seiring dengan perkembangannya, semua organisasi dituntut untuk dapat bersaing memberikan pelayanan yang maksimal, tidak terkecuali organisasi pemerintah. Demikian halnya dengan aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi pemerintah, dituntut dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena hal tersebut merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Pernyataan tersebut menjadi tugas pemerintah daerah selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melaksanankan tugas tersebut.Kehidupan masyarakat yang sejahtera merupakan dambaan seluruh warga negara, karena itu pemerintah terus berupaya untuk mensejahterakan masyarakatnya, namun dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat tersebut tidak semudah membalik telapak tangan, banyak kendala dan hambatan yang dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut.Salah satu langkah penting dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi adalah dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi kepada kepuasan masyarakat dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas, dan profesionalisme melalui pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Keberadaan pemerintah daerah sebagai institusi penyedia pelayanan public yang menganut pemerinthan yang baik diakomodir secara memadai dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sebagai ogansasi sector public pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yan beriritnasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah yang senatiasa tanggap akan tuntuntan lingkunganhya dengan berupaya memberikan pelyanan terbaik secara trnsparan, akuntabiitas dan berkualitas.

Kinerja merupakan unsur yang menajdi salah satu tolak ukur pencapain dari tujuan organisasi tersbut Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas atau prestsi dari sebuah tanggungjawab yang dimiliki atau dibebankan kepada pegwai.

Kinerja menurut Moeharriono (2009:60) merupakan sebuah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksnaaan suatu program kegiatan atau kebijkan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, Visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencaann strategis suatu organisasi. Kinerja merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari

Kinerja pemerintahan yang buruk dapat disebabkan oleh beberapa beberapa faktor diataranya adalah kegagalan pemerintahan dalam melakukan pemantauan dan penentuan perencaann strategis dimensi lain penyebab buruknya kinerja pegawai adalah pelanggaran terhadap etika birokrasi seperti suap menyuap, Korupsi, kolusi dan Nepotisime yang masih mewarnai dalam penyelenggaraan pemerintahan.(Bratiwi, 2011). Selanjutnya Sedarmayati (2006: 45) mengatakan baik buruknya kinerja Apaaratur Pemerintah dapat ditentukan oleh penerapan prinsip-prisnsip good governance dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Instansi pemerintah merupakan organisasi yang tujuan utamanya memberikan pelaayanan kepada masyarakat oleh sebab itu sumber daya manusia yang ada dalam instansi pemerintah dituntut untuk menghasilkan kinerja yang prima. Hal ini juga dipengaruhi .semangat reformasi yang mewarnai pendayagunaaan aparatur Negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang baik, dalam memberikan pelayanan dan pembangunanterhadap masyarakat. .salah satu cara untuk meningkatkan efektivtias kinerja dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah dengan menerapkan prinsip-rinsip governance yag saat ini sedang giat dilakukan dalam instansi pemerintah

Good governance merupakan wujud pentingya suatu tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Untuk itu prinsip-prinsip good governance menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Berawal dari arti good gobvernance itu sendiri maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja sector publik dalam menberikan pertanggungjawab akan segalah aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan

Sinambela (2006:23) memandang good governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan yng menempatkan peran pemerintah sebagai *agen of change* dari suatu masyarakat berkembang yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat,. Untuk mwwujudkan good governance tentuhnya tidak semudah yang dipikirkan dibutuhkan proses dan dukungan masyarakat yang mengacu pada sebuah pemahaman dan perubahan guna tercapaainya good governance dalam birokrasi pemerintah.

Dengan demikian maka birokrasi pemerintah sudah semestinya memiliki peran yang strategi untuk melakukan praktik

Kinerja pegawai yang mencerminkan pada prinsip good governance dapat mendukung terlaksananya pemerintahan yang demokratis dan masyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadap kinerja bahwa setiap pegawai yang mencerminkn pada prinsip-prinsip good governance yang diharapkan dapat memberikan pelayanan public yang lebih baik kepada masyarakat. Good governance adalah suatu tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola dan sikap serta tindak pelakunya dilandasi pada prinsip-prinsip dan karakkteritik tertentuh (Mardiasmo, 2004) .

suatu penyelenggaraan negarayang mengimplmentasikan good governance berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan pada prinsip partisipasi pemerintahan, berdasarkan hukum, transparasi, responsiivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektiivtias dan efisiensi , akuntabilitas. Kecamatan Malaka barat sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka yang berjarak 16 Km dari kota Betun Ibu kota kabupaten Malaka

Sebagai salah satu organisasi sebagai pennyedia layanan public, kecamatan Malaka barat bertanggungjawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga dibutuhkan aparatur yang berkualitas, berintegritas dan memiliki komitmen yang tinggi untuk mampu mendorong kinerja organisasi yang semakin lama semakin membutuhkan dukungan yang kuat dalam usaha mencapai visi dan tujuannya.

Hasil pengamatan awal yang dilakukan terhadap pegawai pada kantor kecamatan Malaka Barat menunjukan bahwa kinerja pegawai belum dilakukan secara optimal dan belum memenuhi prinsip-prinsip good governance dan memiliki berbagai kelemahan seperti Kurang responsive masih rendahnya kemampuan pemerintah kecamatan dalam mengenali kebutuhan masyarakat dan mengembangkan program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi, dan informative masyakat kurang diberikan penjelasan yang lengkap dalam pengurusan surat-surat ijin dan kepemilikian muncul ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan , kurang koordinasi, kurang mendengar keluhan, saran dan aspirasi masyarakat, kurang efisien, oleh sebab itu diperlukan peran pemerintah untuk mewujudkan pemerinntahan yang baik (*Good governance*) yang hadir sebagai bagian utama dari reformsi dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih yang

meliputi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas

Berdasarkan latar belakang diatas,mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PEGAWAI DIKANTOR KECAMATAN MALAKA BARAT,KABUPATEN MALAKA"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas,maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana AKUNTABILITAS dalam meningkatkan kinerja pegawai dikantor Kecamatan Malaka Barat?
2. Bagaimana TRANSPARANSI dalam meningkatkan kinerja pegawai dikantor Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka.
3. Bagaimana Responsivitas dalam meningkatkan kinerja dikantor Kecamatan Malaka Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui mengetahui Transparansi dalam peningkatan kinerja dikantor Kecamatan Malaka Barat.
2) Untuk mengetahui Akuntabilitas dalam peningkatan kinerja dikantor kecamatan Malaka Barat.
3) Untuk mengetahui Responsivitas dalam peningkatan kinerja dikantor kecamatan Malaka Barat.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis Hasil penelitian ini di harapkan dapat memerikan sumbangan pikiran ilmiah menambah wawasan,pengetahuan, pengalaman bagi pihak-pihak ain yang akan melakukan penelitian sejenis.
b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah kecamatan Malaka Barat khusunya pemerintah kecmatan Malaka barat dalam menjalankan dan meningkatkan kinerja pegwai.

3. Metode Penulisan

1. Jenis Data
    a. Data primer

       Yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objek penelitian.
    b. Data sekunder

       Yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian.
2. Teknik Pengumpulan Data

   Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu seperti telepon,email atau skype.
3. Teknik Analisis Data

   Tenknik yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.Teknik analisis digunakan untuk menganalisis data hasil wawancara yang di kumpulkan dari seluruh sumber.